

PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018)

THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, LOCAL GOVERNMENT REVENUE, AND AUDIT OPINION OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE (A Case Study of Local Government Regencies/Cities in D.I Yogyakarta Province 2013-2018)

Endri Lestari¹, Dini Wahjoe Hapsari, SE., M.Si., Ak., CA²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Indrilestari@student.telkomuniversity.ac.id dinihapsari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu capaian ataupun bisa disebut tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga tercapainya tujuan daerah otonom tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta pada periode 2013-2018 baik secara simultan maupun parsial.

Fenomena dalam penelitian ini dieksplorasi dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) selama enam tahun dari tahun 2013-2018. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan rasio efektivitas. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan *Software Spss 24*.

Hasil penelitian ini adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi di D.I Yogyakarta tahun 2013-2018. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018, variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018 dan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, serta diharapkan dapat memberikan gambaran serta motivasi kepada masyarakat agar ikut berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah yang lebih baik dalam setiap kerjanya serta tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi daerahnya.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Kinerja Keuangan

Abstract

The financial performance of local governments is an achievement or can be called a measure of the success of local governments in managing their regional financial resources. So that with good management it is hoped that it can provide good services so that the goals of the autonomous region can be achieved.

This study aims to determine the effect of capital expenditure, local revenue (PAD), and audit opinion on the financial performance of district / municipal governments in the province of D.I Yogyakarta in the 2013-2018 period, either simultaneously or partially.

The phenomena in this study were explored using the case study method. The data collection technique is to use secondary data in the form of a time series for six years from 2013-2018. The population in this study were all districts / cities in the province of D.I Yogyakarta. The financial performance of local governments in this study uses the effectiveness ratio. The analysis used in this study is multiple linear regression using Spss 24 Software.

The results of this study are Capital Expenditures, Local Government Revenue (PAD), and Audit Opinion simultaneously have a significant effect on the financial performance of districts / cities in the Province of D.I Yogyakarta in 2013-2018. Capital expenditures have a significant effect on the financial performance of the government in districts / cities in DI Yogyakarta Province in 2013-2018, the local revenue (PAD) variable has no significant effect on the financial performance of local governments in districts / cities in D.I Yogyakarta Province

in 2013-2018 and the variables Audit opinion does not have a significant effect on the financial performance of local governments in districts / cities in Yogyakarta Province in 2013-2018.

The results of this study are expected to be used as an evaluation in improving regional financial performance, and are expected to provide an overview and motivation for the community to contribute directly to improving regional financial performance that is better in each of its performance and the achievement of welfare and progress for the region.

Keywords: *Capital Expenditures, Regional Original Revenues, Audit Opinion, Financial Performance.*

1. Pendahuluan

Di era yang sangat berkembang saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Kebebasan tersebut merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Peran Pemerintah Daerah sendiri dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar, sebagai bentuk implementasi kinerja Pemda itu sendiri. Kinerja keuangan menurut (Nugroho & Prasetyo, 2018)^[1], didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal penting bagi pemerintah daerah dan pihak yang membutuhkan. Pengukuran kinerja keuangan bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah, yaitu salah satunya adalah menggunakan rasio efisiensi dimana, pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai pemda dari satu periode ke periode berikutnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah.

Menurut Andirfa, et al., (2016)^[2], belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. belanja modal yang besar merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang telah dilakukan Pemda, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Dalam menunjang penambahan dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah yang diharapkan untuk memacu pertumbuhan perekonomian, dalam segi pengelolaan keuangan daerah tergantung dari pendapatan daerah karena meningkatnya pendapatan daerah maka akan meningkatkan penghasilan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu sektor pendapatan daerah sangat diutamakan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004^[3], pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai prinsip ataupun kebijakan dalam pengelolaan daerah otonomnya tertuang dalam hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yaitu hasil penilaian laporan keuangan dalam bentuk opini audit. Opini Audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017^[4], terdapat lima jenis opini yang diberikan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Paragraf Penjelasan (WTP- DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

2 Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2016:24)^[5], kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengertian kinerja keuangan daerah secara spesifik adalah hasil dari kegiatan atas program yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam mengelola alokasi sumber daya dan penggunaan anggaran untuk kegiatan otonomi daerahnya dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas Menurut Mardiasmo (2017: 134)^[6], Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah}}{\text{Target pendapatan asli daerah}}$$

2.1.2 Belanja Modal

Menurut (Halim,2014:235)^[7], belanja modal merupakan salah satu dari kelompok belanja daerah yang berdasarkan jenisnya, sangat penting dalam memegang peranan terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, hal tersebut dikarenakan banyak melakukan kegiatan belanja modal, diasumsikan akan membawa multiplier effect bagi perekonomian suatu masyarakat melalui pembangunan jalan, jembatan, pabrik dan sebagainya.

Menurut Andirfa, et al., (2016)^[2], belanja modal merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang telah dilakukan Pemda, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Belanja modal dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Ln = \text{Total Realisasi Belanja Modal}$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004^[3], pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Putri & Darmayanti, (2019)^[8], Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Ln = \text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}$$

2.1.4 Opini Audit

Opini Audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017^[4], terdapat lima jenis opini yang diberikan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Paragraf Penjelas (WTP- DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Menurut (Dewata, et al, 2018)^[9], semakin baik opini audit, skor kinerja pemerintah daerah dan kota akan lebih tinggi. Opini audit disa digunakan sebagai pengambil kebijakan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2015:73)^[10], opini audit adalah kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), serta lengkap informasinya (*full disclosure*). Opini audit dapat diukur dengan perolehan opini yang berasal dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan variabel *dummy*, yaitu mendapatkan nilai 1 apabila pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai 0 apabila pemerintah daerah mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Andirfa, et al., (2016)^[2], belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. belanja modal yang besar merupakan gambaran dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang telah dilakukan Pemda, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

H₁: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.2 Pengaruh Tingkat Utang Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004^[3], pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Putri & Darmayanti, (2019)^[8], Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena pendapatan asli daerah paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut

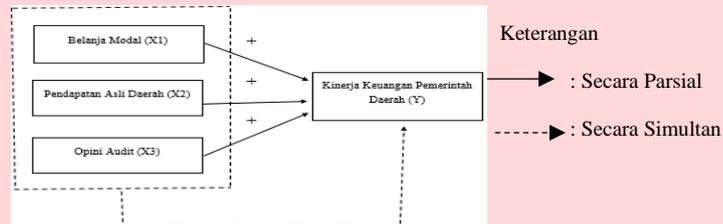
H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.3 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017^[4], terdapat lima jenis opini yang diberikan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Paragraf Penjelas (WTP- DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Menurut (Dewata, et al, 2018)^[9], semakin baik opini audit, skor kinerja pemerintah daerah dan kota akan lebih tinggi. Opini audit disa digunakan sebagai pengambil kebijakan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2015:73)^[10], opini audit adalah kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), serta lengkap informasinya (*full disclosure*).

H₃: Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dan website resmi Badan Pemeriksa Keuangan melalui laporan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan). Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Berdasarkan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi dijadikan sampel yaitu dari tahun 2013-2018, dengan jumlah sampel sebanyak 30 sampel yang terdiri dari data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS 24*. Berikut persamaan regresi data panel pada penelitian ini:

$$KK = \alpha + BM \beta_1 + PAD \beta_2 + OA \beta_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- KK = Kinerja Keuangan
- α = Konstanta
- BM = Belanja Modal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- OA = Opini Audit
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel
- e = Standar error

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif kinerja keuangan, belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan opini audit:

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KK	30	.91	1.76	1.2527	.19575
BM	30	25.54	26.78	26.2747	.34278
PAD	30	25.15	27.52	26.5280	.63036
OP	30	0	1	.93	.254
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2020)

Hasil pengujian diatas yang terdapat pada Tabel 4.1. Menunjukkan bahwa:

- a. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018 memiliki nilai minimum terendah pada tahun 2018 sebesar 1,02 atau setara 102% Kinerja keuangan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.91 atau sekitar 91% dan standar deviasi sebesar 0,19575.
- b. Belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018 memiliki nilai minimum sebesar 25.54,. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 26.78. nilai rata-rata (mean) sebesar

26.27 sedangkan standar deviasi sebesar 0.34278.

- c. Pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018 memiliki nilai minimum sebesar 25.15. Sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 27.52. Memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 26.52 sedangkan standar deviasi sebesar 0.63036.
- d. Variabel independen ketiga adalah opini audit yang memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.93 sedangkan standar deviasi sebesar 0.254 yang artinya standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga data tersebut tidak bervariasi dan homogen (cenderung berkelompok)

4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.116	2.734		2.969	.006
	BM	-.340	.132	-.595	-2.578	.016
	PAD	.083	.071	.267	1.169	.253
	OP	-.146	.146	-.189	-.997	.328

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: SPSS 24 data diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.10 dibawah dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda berikut :

$$KK = 8,116 - 0,340 + 0,083 \text{ PAD} - 0,146 \text{ BM} + e$$

- a. Konstanta sebesar 8,116 yang artinya bahwa semua variabel belanja modal (X1), pendapatan asli daerah (X2), dan opini audit (X3) dianggap konstan atau dianggap tidak ada sama dengan nol. Maka nilai atau skor kinerja keuangan kinerja keuanagan nilainya sebesar 8,116.
- b. Koefisien variabel belanja modal sebesar -0,340 menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan penerimaan belanja modal, maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan sebesar -0,340
- c. Koefisien variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,083 yang menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan sebesar 0,083.
- d. Koefisien variabel opini audit sebesar -0,146 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan opini audit, maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan sebesar -0,146

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa jauh suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4.4 Uji KoefisienDeterminasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.553 ^a	.306	.226	.17227	1.950
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: SPSS 24 data diolah (2020)

Dari hasil uji R² pada tabel 4.10 dibawah, diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,226 atau 22,6%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan dapat dijelaskan sebesar 22,6% oleh variabel independen yaitu belanja

modal, pendapatan asli daerah dan opini audit Dan sisanya 77,4% (100% - 22,6%) dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor-faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dana perimbangan, atau faktor-faktor lainnya.

4.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.4 Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	.340	3	.113	3.815	.022 ^b
	Residual	.772	26	.030		
	Total	1.111	29			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber: SPSS 24 data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh dengan hasil pengujian simultan bahwa nilai signifikan sebesar 0.022 lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD), dan opini audit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.

4.3.3 Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 4.5
Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.116	2.734		2.969	.006
	BM	-.340	.132	-.595	-2.578	.016
	PAD	.083	.071	.267	1.169	.253
	OP	-.146	.146	-.189	-.997	.328
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Sumber: SPSS 24 data diolah (2020)

Kekuatan hubungan yang terjadi diantara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Variabel belanja modal memiliki nilai signifikan sebesar $0.016 < 0.05$, maka variabel belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018, maka hipotesis diterima.
2. Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai signifikan sebesar $0.253 > 0.05$, maka variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018, maka hipotesis ditolak.
3. Variabel opini audit memiliki nilai signifikan sebesar $0.328 > 0.05$, maka variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018, maka hipotesis ditolak.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan pengujian secara simultan (Uji F) dapat dilihat nilai F-hitung pada tabel 4.12 memiliki nilai signifikansi sebesar 0.022 lebih kecil daripada 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa secara simultan variabel. belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD), dan opini audit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018.

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil dengan nilai signifikan sebesar 0.016 lebih kecil dibandingkan 0,05 yang artinya bahwa ada pengaruh signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah dibangun, yaitu belanja modal yang diukur dengan total realisasi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan dan pengalokasian belanja modal yang baik dan tepat akan menciptakan tersedianya infrastruktur yang baik yang dapat menciptakan efektivitas diberbagai sektor sehingga menyebabkan produktivitas masyarakat yang tinggi dan tercapainya peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat disimpulkan jika sumber yang dihasilkan berlimpah maka nantinya hasil yang didapat pun juga akan melimpah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al.*, (2016) dan Aminah *et al.*, (2019), bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sebagai investasi jangka panjang dan sarana pembangunan daerah belanja modal dapat memberikan manfaat dan dana tambahan bagi keuangan daerah setiap tahunnya.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.253 lebih besar dibandingkan 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Jika pemda dalam menggali sumber kekayaan daerah dilakukan secara merata maka akan meningkatkan sumber kekayaan daerah itu sendiri, sehingga terciptanya keselarasan antara pendapatan dan kinerja keuangan pemda sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

4.4.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.328 lebih besar dibandingkan 0,05, dapat diartikan bahwa opini audit tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Opini audit semakin bagus atau dikatakan WTP tidak menjamin kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Hal tersebut membuat pandangan masyarakat mengenai opini audit jika semakin baik opini dalam laporan keuangan pemda maka semakin baik juga untuk pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan daerah, karena penilaian tersebut dapat dijadikan suatu prestasi bagi daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah belanja modal, pendapatan asli daerah, dan opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah secara simultan pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018. Secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan opini audit berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

5.2.1 Aspek Teoritis

a. Bagi pihak akademis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel seperti seperti ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dana perimbangan dan lain sebagainya. Dengan adanya keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta dan pada periode 2013-2018, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan kabupaten/kota lain yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta dengan periode tahun yang lain. Dengan adanya kelemahan dalam penelitian ini untuk menjadi suatu pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.

5.2.2 Aspek Praktis

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2013-2018 peneliti mengharapkan agar pemerintah daerah lebih memerhatikan terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan kinerja keuangan setiap kabupaten dan kota di provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki kenaikan maupun penurunan dalam efektivitas kinerja keuangan, harapannya menjadi evaluasi dalam penganggaran dan realiasi setiap tahunnya agar lebih baik dalam setiap kinerjanya serta tercapainya kesejahteraan dan kemajuan bagi daerahnya. Untuk publik, baik masyarakat, investor, maupun pengguna informasi dapat digunakan sebagai sumber informasi serta diharapkan dapat membantu pengawasan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya dalam kinerja keuangan pemda agar semua kebijakan ataupun dalam bentuk pengelolaan serta pengawasan berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur (Vol. 7). Madiun: ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan.
- [2] Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. A. (2016, Agustus). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 5.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pendapatan Asli Daerah
- [4] Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017. Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- [5] Halim, A., & Hanafi, M. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [6] Mardiasmo, Mba., Ak., CA., P. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [7] Halim, A., & Kusufi, M. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Putri, N. N., & Darmayanti, N. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 5, 2019 : 2834-2861 ISSN : 2302-8912 .
- [9] Dewata, E., Jauhari, H., Aprianti, S., & Hijria , E. N. (2018). *The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on the Performance of District and City Governments in Indonesia*.
- [10] Halim, A. (2015). Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi Kelima Jilid 1. Yogyakarta: Brand.
- [11] Andani, M., Sarwani, & Respati, N. W. (2019, Agustus). Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol. 9 No. 2, 111-130.
- [12] Mardiasni, P. R., & Erawati, N. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. (Februari)1150-1182 ISSN: 2302-8556.